

BULETIN

STATISTIK SEKTORAL KOTA BATAM



10 FEBRUARI 2026

<https://satudata.batam.go.id>

VOL. 38



PEMERINTAHAN DIGITAL

Halo Sobat data, Lauraine Snelling, seorang penulis fiksi Amerika dan telah menerbitkan lebih dari 80 judul sejak tahun 1982 menyatakan bahwa meski february adalah bulan terpendek dalam setahun, terkadang tampak seperti bulan yang terpanjang. So, Selamat bulan february 2026.

Edisi kali ini kita akan mengulas sekilas tentang Pemerintahan Digital atau sering juga disebut Digital Government atau e-Government.

Dikutip dari laman komdigi.go.id, Pemerintahan digital (digital government atau e-government) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengelola data, menyederhanakan proses kerja administrasi, serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Indonesia menerapkan konsep ini melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Berbeda dengan sekadar memindahkan dokumen kertas ke aplikasi, pemerintahan digital berfokus pada ekosistem yang terintegrasi, transparan, dan berorientasi penuh pada kebutuhan pengguna (user-centric).

Pemerintahan digital kini bukan lagi sekadar pilihan atau tren operasional, melainkan sebuah kebutuhan mutlak dalam mereformasi birokrasi modern. Secara mendasar, pemerintahan digital merupakan bentuk penyelenggaraan tata kelola negara yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menyederhanakan proses kerja, mengintegrasikan data, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Esensi dari konsep ini melampaui sekadar digitalisasi dokumen kertas menjadi berkas PDF; pemerintahan digital berfokus pada pembangunan ekosistem yang terintegrasi, transparan, dan berorientasi penuh pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Redaktur:
Rian Irvandi, S.STP

Editor:
Tengku Indra Darmawan, S.IP
Muhammad Jasrol, S.IP

Pembuat Artikel:
Andri Nurahman, SE.
Rini Afriyanti, S.Pd.M.M

Desain Grafis:
Della Jhonata, S.Kom
Nurhidayah Pratama Dewi

KOMDigi
KOTA BATAM

BerAKHLAK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM
Gedung Kantor Walikota Batam
Jl. Engku Putri No. 01 Batam Center
Kode Pos: 29461
628117787103

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM
BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERKELANJUTAN DAN BERJUJAH SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARAWISATA TERDEPAN DI ASIA TENGGARA
- Visi Pemerintah Kota Batam -

SUPPORT CENTRE
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<https://support.batam.go.id>

MEDIA CENTER PEMERINTAH KOTA BATAM
AKTUAL DAN TERDEPAN DALAM PELAYANAN INFORMASI
<https://mediacenter.batam.go.id>

0 MEDIA CENTER PEMERINTAH KOTA BATAM 0 @MKBatam

Karakteristik Pemerintahan Digital

Pemerintahan digital dicirikan oleh pergeseran paradigma dari birokrasi yang kaku menuju pelayanan yang tangkas (agile). Karakteristik pertamanya adalah Berpusat pada Pengguna (User-Centric), di mana setiap platform dirancang secara intuitif agar mudah diakses oleh semua lapisan warga.

Kedua, terdapat Integrasi Data Tanpa Sekat yang menghancurkan batasan antar-instansi atau data silo. Karakteristik ketiga yang paling krusial adalah Berbasis Data (Data-Driven), yang berarti setiap keputusan politik, penyusunan anggaran, dan perumusan kebijakan publik wajib bersandar pada analisis data yang valid, bukan lagi sekadar asumsi atau perkiraan normatif.

Di lapangan, karakteristik ini tecermin nyata pada tata kelola Pemerintah Kota Batam. Untuk memutus keterisolasian data, Diskominfo Kota Batam menyatukan data puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke dalam portal Satu Data Kota Batam. Prinsip data-driven ini kemudian dikunci melalui modul e-Walidata (SIPD RI), sehingga Bappeda Kota Batam wajib merujuk pada basis data sektoral yang valid sebelum menyetujui program pembangunan atau anggaran daerah.

Manfaat Nyata

Implementasi pemerintahan digital membawa dampak disruptif yang positif pada aspek efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dari sisi **efisiensi**, proses birokrasi yang berbelit-belit berhasil dipangkas secara signifikan. Warga Kota Batam kini dapat mengurus dokumen kependudukan atau surat keterangan tingkat kelurahan secara mandiri secara online melalui aplikasi **ASIKLO**.

Dari aspek **transparansi dan akuntabilitas**, digitalisasi menutup celah terjadinya pungutan liar (pungli) karena mengurangi interaksi tatap muka langsung. Penggunaan alat pemantau transaksi (tapping box) pada sektor usaha di Batam tidak hanya meningkatkan akurasi penerimaan pajak daerah, tetapi juga memastikan keuangan daerah dikelola secara terbuka. Selain itu, **partisipasi publik** ikut terdongkrak karena masyarakat diberikan kanal langsung untuk mengawasi Kotanya.

Lewat aplikasi pengaduan **Apekesah**, laporan mengenai infrastruktur rusak atau kendala layanan publik langsung masuk ke sistem instansi terkait untuk segera ditindaklanjuti, didukung dengan pemantauan situasi kota 24 jam via **Matanya Batam**.

Dan di balik itu semua, pemerintah pun menikmati **efisiensi anggaran** operasional berkat pengurangan penggunaan kertas (paperless) serta efisiensi logistik rapat melalui platform digital internal seperti **SASTRA** (Sistem Administrasi Rapat).



Pemko Batam bersama dengan Kemkominfo RI selenggarakan Literasi Digital bagi ASN dan SDM Pemko Batam beberapa waktu yang lalu. (mediacenter.batam.go.id)

Elemen Pendukung

Transformasi menuju pemerintahan digital yang sukses membutuhkan topangan tiga elemen pendukung yang saling berinteraksi: infrastruktur teknologi, kecerdasan sistem, dan kesiapan manusia.

- 1. Infrastruktur Digital dan Keamanan:** Fondasi utama berupa jaringan internet yang andal, Pusat Data Nasional (PDN), dan benteng keamanan siber (cybersecurity). Di Batam, hal ini diwujudkan lewat pusat kendali layanan TI (**SIMELATI**) serta pengetatan regulasi ruang siber demi melindungi data warga dan memastikan keamanan digital bagi anak-anak.
- 2. Teknologi Cerdas:** Pemanfaatan Big Data Analytics untuk mengolah jutaan baris data menjadi informasi siap pakai. Manifestasinya di Batam berupa penerbitan Dokumen Kompilasi Data Statistik Sektoral secara berkala untuk menjaga transparansi pasokan data daerah.

3. Kesiapan SDM dan Kolaborasi: Sistem canggih tidak akan berdampak tanpa aparatur yang cakap dan masyarakat yang literat.

Kunci keberhasilan tata kelola digital di Batam terletak pada sinergi yang harmonis antara Diskominfo Batam sebagai Walidata yang mengelola platform teknologi, dan BPS Kota Batam sebagai Pembina Data yang memastikan seluruh operator dinas menguasai ilmu statistik serta standar metadata nasional.

Melalui kesiapan infrastruktur, integrasi data, dan kolaborasi kelembagaan yang solid, Kota Batam sukses mempertahankan Indeks SPBE sebesar 3,77 dengan predikat "Sangat Baik".

Capaian ini membuktikan bahwa pemerintahan digital bukan sekadar perlombaan membuat aplikasi baru, melainkan sebuah komitmen berkelanjutan untuk mengintegrasikan data demi menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Kaitan dengan Statistik Sektoral

Statistik sektoral adalah bahan baku utama, mesin penggerak, sekaligus indikator keberhasilan dari pemerintahan digital. Pemerintahan digital tidak akan bisa berjalan tanpa adanya pasokan data yang valid, sedangkan statistik sektoral memerlukan infrastruktur digital agar data tersebut dapat dikelola dan dibagikan secara efisien.

Pemerintahan digital bertujuan mengubah cara kerja pemerintah agar mengambil keputusan berdasarkan data, bukan asumsi. Statistik sektoral (seperti data angka kemiskinan, jumlah sekolah, atau fasilitas kesehatan yang dikumpulkan instansi terkait) menyediakan data spesifik tersebut.

Data digital ini diolah secara cepat untuk merumuskan kebijakan publik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam arsitektur pemerintahan digital, pengelolaan data wajib mengacu pada program Satu Data Indonesia (SDI). Statistik sektoral yang diproduksi oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disatukan ke dalam wadah digital (seperti platform e-Walidata di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)).

Indikator Kinerja

Hubungan ini bersifat formal dan diatur oleh hukum negara. Kinerja pengelolaan statistik sektoral memengaruhi penilaian Indeks Pemerintahan Digital (Indeks Pemdi).

Aspek pengelolaan data (termasuk kematangan statistik sektoral dan pemenuhan metadata) memegang bobot nilai yang signifikan dalam mengukur kesuksesan transformasi digital suatu daerah.

Sebelum sistem data sektoral dibenahi, instansi pemerintah cenderung membuat ribuan aplikasi sendiri-sendiri yang justru memicu penumpukan data terisolasi (data silo).

Melalui standarisasi statistik sektoral, pemerintahan digital mendorong interoperabilitas (kemampuan sistem untuk saling terhubung), sehingga data dari satu aplikasi sektor dapat langsung digunakan oleh sektor lainnya.

Kolaborasi Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Dalam mewujudkan keterkaitan ini, perlu dibentuk ekosistem kerja digital yang melibatkan tiga peran utama:

- **Produsen Data**, yaitu Instansi/OPD teknis yang mengumpulkan statistik sektoral di lapangan.
- **Walidata**, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang mengelola bursa data digital.
- **Pembina Data**, yakni Badan Pusat Statistik (BPS) yang memastikan kualitas data memenuhi standar nasional.

Pada akhirnya, transformasi menuju pemerintahan digital bukanlah sekadar migrasi teknologi dari sistem manual ke ruang virtual, melainkan sebuah revolusi paradigma dalam melayani masyarakat. Keberhasilan Pemerintah Kota Batam dalam mengintegrasikan statistik sektoral ke dalam platform e-Walidata serta mempertahankan Indeks SPBE di predikat "Sangat Baik" menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada komitmen kolaboratif, keandalan infrastruktur siber dan validitas data yang dihasilkan.

INFOGRAFIS

PEMERINTAHAN DIGITAL

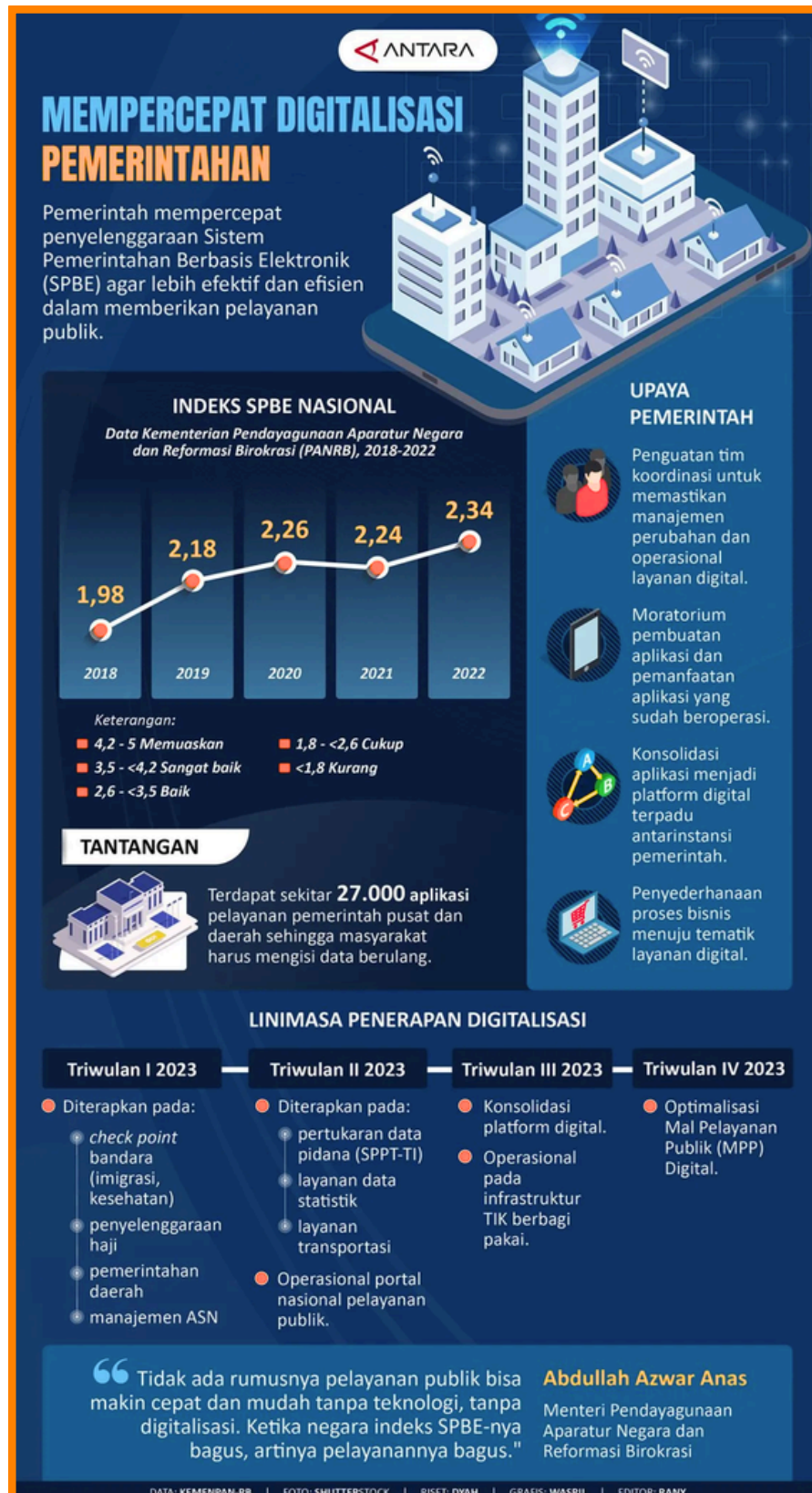


Sumber: https://www.instagram.com/p/DZy-ldIGZLY/?img_index=1




INFOGRAFIS

PEMERINTAHAN DIGITAL



INFOGRAFIS


PEMERINTAHAN DIGITAL




Masyarakat makin melek digital

Pemahaman masyarakat Indonesia terhadap dunia digital menunjukkan peningkatan, dibuktikan dari Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Kamis (2/10).

Tentang IMDI




Mengukur kemampuan menggunakan teknologi digital dalam keseharian masyarakat.



Terdapat 4 aspek yang diukur, yakni infrastruktur dan ekosistem, literasi digital, pemberdayaan serta penerapan dalam pekerjaan.

Tren nilai IMDI

Data Kemkomdigi 2022-2025



Tahun	Nilai
2022	37,80
2023	43,18
2024	43,34
2025	44,53
2026 (target)	45,33


Kenaikan poin menunjukkan terjadi percepatan transformasi digital dan masyarakat semakin cakap mengadopsi teknologi digital.

Kenaikan indeks 2025 dipengaruhi:

- Transformasi layanan secara digital oleh pemerintah dan swasta, misalnya kependudukan dan perbankan.
- Pembangunan infrastruktur digital, seperti akses internet, yang semakin merata.
- Kebutuhan talenta digital dengan kecakapan teknologi semakin banyak.


Legenda:

- Rendah: 33,66-39,69
- Cukup: 39,70-51,73
- Tinggi: 51,74-57,76



Provinsi dengan nilai tertinggi 2025


Data Kemkomdigi 2 Oktober 2025



Provinsi	Nilai
DKI Jakarta	56,97
Kep. Bangka Belitung	52,15
Jawa Barat	52,05
Jawa Tengah	51,19
DI Yogyakarta	51,13


“Di 2025 ini, (IMDI) kita naik dari 2024 menjadi 44,53. Angka itu bukan sekadar statistik, tetapi merupakan bukti nyata bahwa Indonesia bergerak menuju visi besar pemerintah digital 2045.”

Manfaat kenaikan IMDI




Mempermudah urusan masyarakat seiring pemanfaatan teknologi pada aspek yang lebih luas.

Manfaat Kenaikan IMDI




Mencegah masyarakat terkena kejahatan siber yang merugikan secara finansial.

Manfaat Kenaikan IMDI



Memacu perekonomian masyarakat dengan kreativitas dan kecakapan digital.



Meutya Hafid
Menteri Komunikasi dan Digital

DATA: KEMKOMDIGI | ILLUSTRASI: ANTARAFOTO | RISET: IQBAL | GRAFIS: WASRIL | EDITOR: DYAH

INFOGRAFIS

PEMERINTAHAN DIGITAL

PANDUAN DASAR PEMAHAMAN

MENGENAL INDEKS PEMERINTAH DIGITAL

Evolusi & Transisi dari Indeks SPBE yang berfokus pada hasil nyata di masyarakat

1 PERGESERAN FOKUS
HULU KE HILIR

2 STRUKTUR PENILAIAN BARU
7 ASPEK & 20 INDIKATOR

3 PRINSIP PENILAIAN MODERN

4 TINGKAT KEMATANGAN DASAR

5 TARGET NASIONAL

6 LANGKAH AWAL BAGI INSTANSI

7 ARAH BESAR PEMDI

MENDUKUNG VISI INDONESIA EMAS 2045

PEMDI bukan sekadar penilaian, tapi kompas menuju pemerintahan digital yang berdampak nyata bagi masyarakat. Mulai dari sekarang, wujudkan layanan digital yang lebih baik untuk Indonesia!

InsightbyRian

BERDASARKAN RPJPN 2025-2045

LAYANAN & APLIKASI PRIORITAS PEMERINTAH DIGITAL

Mendorong layanan publik yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat untuk Indonesia Emas 2045.

1 LAYANAN KESEHATAN UNTUK SEMUA

2 LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS

3 LAYANAN PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF

4 LAYANAN KETENAGAKERJAAN

5 LAYANAN KEPOLISIAN DAN KENDARAAN

6 LAYANAN PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN

7 LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

8 LAYANAN PERIJINAN BERUSAHA

9 LAYANAN PERPAJAKAN

10 LAYANAN IMIGRASI

11 LAYANAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN

TUJUAN UTAMA

TERINTEGRASI DALAM PORTAL NASIONAL

Integrasi: Semua layanan terhubung dalam satu portal nasional terpadu.

Interoperabilitas: Data dan sistem saling terhubung antar instansi secara aman.

Berorientasi Pengguna: Layanan mudah diakses, cepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pemanfaatan Teknologi Masa Depan: Menggunakan Kecerdasan Artificial (AI) untuk layanan yang lebih cerdas & proaktif.

Pemerintah Digital adalah fondasi menuju birokrasi yang lincah, layanan publik yang prima, dan masa depan Indonesia yang maju!

InsightbyRian

Sumber: https://www.instagram.com/insightbyrian/p/DYs_JCPE4i0/?img_index=2